

PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

Annisa Maharani Kurnia

NPP. 30.0606

Asdaf Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0606@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Eko Subowo, MBA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is motivated by the phenomenon of financial fraud cases in Indonesia and the existence of obstacles in the implementation of non-cash transactions in Pandeglang Regency. **Purpose:** the purpose of this study This study aims to determine the effect of Non-Cash Transactions on Regional Financial Management Accountability in Pandeglang Regency, Banten Province. **Method:** The method is quantitative and the primary data source is a closed questionnaire. The population used is 140 Spending Treasurers, Revenue Treasurers and Heads of Finance Sub-sections of all regional organizations. The sample is simple random sampling with a sample of 60 randomly selected. The analytical use the Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 26.0. **Result:** The results showed that H_0 was rejected and H_1 was accepted or Non-Cash Transactions had a significant effect on the Accountability of Regional Financial Management indicated by the result value t_{count} 12.055 greater than t_{table} 1.67155 or a significance value of 0.000 greater than 0.05. Meanwhile, the effect of non-cash transactions on the accountability of regional financial management is shown by the results of the coefficient of determination test where the Adjusted R Square value is 0.710 or 71% greater than 0.67 in the strong category. **Conclusion:** Based on the variable test between non-cash transactions (X) on regional financial management accountability (Y) has a significant effect.*

Keywords: *Transactions Non-Cash, Accountability, Management Finance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kasus penyelewengan keuangan di Indonesia dan adanya kendala dalam penerapan transaksi non tunai di Kabupaten Pandeglang **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. **Metode:** Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber data primer berupa kuesioner tertutup. Populasi yang digunakan adalah 140 Bendahara Peneluaran, Bendahara Penerimaan dan Kepala Sub-bagian Keuangan seluruh organisasi perangkat

daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *simple random sampling* dengan sampel berjumlah 60 yang dipilih secara acak. Analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan aplikasi *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26.0*. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima atau Transaksi Non Tunai berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan nilai hasil t_{hitung} 12,055 lebih besar dari t_{tabel} 1,67155 atau nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Sedangkan besar pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan hasil uji koefisien determinasi dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,710 atau 71% lebih besar dari 0,67 dengan kategori kuat. **Kesimpulan:** Berdasarkan uji variabel antara transaksi non tunai (X) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci: Transaksi Non Tunai, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum sesuai dengan sumber dan peruntukan yang telah disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan menjadi dasar pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang terhindar dari bentuk-bentuk penyimpangan keuangan.

Penyimpangan penggunaan keuangan merupakan fenomena yang sering terjadi pada pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanganan suatu transaksi yang disebabkan karena adanya oknum pemerintah yang melakukan korupsi dan sengaja berupaya memperoleh manfaat secara tidak sah dari penggunaan uang daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain karena adanya kesempatan. Berdasarkan data dari ICW jumlah kasus korupsi di Indonesia melonjak pada tahun 2020, maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan upaya mempersempit ruang gerak atau celah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, terdapat tiga aspek utama yang perlu dilakukan untuk mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya percepatan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) di kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pemerintah pusat dan daerah terus berinovasi untuk mewujudkan pembenahan tata kelola keuangan. Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No. 910/1867/SJ 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah paling lambat 01 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan/ pengeluaran, Bupati menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai dan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara bertahap melakukan beberapa upaya guna mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi dari sisi penerimaan pendapatan melalui penerapan TNT.

Menurut Yudhanti (2018) menyatakan bahwa Transaksi Non Tunai meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah, hal tersebut dikarenakan sistem transaksi pembayaran non tunai didukung dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi akan mencatat transaksi secara *real time* dan akurat yang dapat membuat operasional perusahaan semakin efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara bertahap melakukan beberapa upaya guna mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi dari sisi penerimaan pendapatan melalui penerapan TNT. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan melakukan pemetaan terhadap retribusi daerah sesuai dengan kompleksitas masing-masing retribusi. Dalam pendapatan retribusi Kabupaten Pandeglang menggunakan aplikasi keuangan SIPKD. Dari 15 jenis Pendapatan Retribusi Kabupaten Pandeglang sudah menggunakan kanal Semi Digital seperti melakukan pembayaran melalui petugas pungut/bendahara, pembayaran langsung ke teller/loket bank dan ada juga yang sudah full digital seperti m-banking.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang juga menjadi acuan. Penelitian Yudhanti yang berjudul penerapan sistem transaksi non tunai terhadap akuntabilitas kinerja manajerial. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajerial kinerja, penerapan sistem transaksi non tunai berpengaruh signifikan secara langsung kinerja manajerial, dan penerapan sistem transaksi nontunai berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial melalui akuntabilitas (Yudhanti; 2018)

Penelitian dengan judul pengaruh penerapan *Good Governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan penelitian ini. Implementasi tata kelola yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Akuntansi Implementasi Standar pemerintah secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas keuangan (Zeyn; 2011). Laporan keuangan merupakan komponen terpenting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik selain itu laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menciptakan akuntabilitas publik.

Penelitian Sandyasmoro dengan judul Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan *Fraud* dan Kinerja Bendahara (Persepsi Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Magetan). Pada penelitiannya diungkapkan bahwa penerapan kebijakan transaksi nontunai dirasakan telah dilaksanakan dengan baik dari segi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Sandyasmoro; 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel transaksi non tunai dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pandeglang dengan responden sebanyak 60 orang yang terdiri dari pelaku keuangan yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pandeglang.

II METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh antara variabel transaksi non tunai (X) dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Penulis menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada pihak-pihak pengguna anggaran yaitu bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan kepala subbagian keuangan dari OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Pandeglang sebanyak 60 orang sebagai sampel. Teknik analisis data dengan melakukan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linear sederhana dan uji hipotesis.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan alat bantu *software* berbentuk aplikasi statistik (aplikasi SPSS) dalam menghitung data dalam penelitian, dalam penelitian kuantitatif ini analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.

3.1 Uji Instrumen Penelitian

3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner untuk mengukur dan memperoleh data penelitian dari pada responden.

Tabel 3. 1

Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
Transaksi Non Tunai			
X1	0,446	0,2542	Valid
X2	0,760		Valid
X3	0,374		Valid
X4	0,701		Valid
X5	0,620		Valid
X6	0,724		Valid
X7	0,725		Valid
X8	0,512		Valid
X9	0,840		Valid
X10	0,816		Valid
X11	0,658		Valid
X12	0,716		Valid
X13	0,790		Valid

X14	0,792		Valid
X15	0,714		Valid
X16	0,766		Valid
X17	0,767		Valid
X18	0,810		Valid
X19	0,751		Valid
X20	0,770		Valid
Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah			
Y1	0,846	0,2542	Valid
Y2	0,787		Valid
Y3	0,826		Valid
Y4	0,817		Valid
Y5	0,819		Valid
Y6	0,769		Valid
Y7	0,881		Valid
Y8	0,852		Valid
Y9	0,874		Valid
Y10	0,708		Valid
Y11	0,823		Valid
Y12	0,840		Valid
Y13	0,803		Valid
Y14	0,884		Valid
Y15	0,877		Valid
Y16	0,869		Valid
Y17	0,862		Valid
Y18	0,751		Valid
Y19	0,567		Valid
Y20	0,621		Valid

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa setiap indikator pernyataan baik dari variabel X maupun variabel Y dikatakan valid yang dan dapat mewakili penelitian ini, karena masing masing indikator memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}

3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner yang digunakan memiliki konsistensi apabila pernyataan tersebut dilakukan seacara berulang-ulang.

Tabel 3. 2
 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.939	20

Tabel 3. 3
 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.970	20

Uji reliabilitas menggunakan Teknik Cronbach's Alpha dengan ketentuan dikatakan variabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Tabel 3.2 dan 3.3 dapat dilihat bahwa variabel X dan Y dapat dinyatakan reliabel.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan uji normalitas sebagai uji asumsi klasik untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Peneliti menggunakan jenis *Kolmogorov Smirnov* dengan melihat nilai residualnya. Dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 3. 4
 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.59398390
Most Extreme Differences	Absolute	.295
	Positive	.119
	Negative	-.295
Test Statistic		.295
Asymp. Sig. (2-tailed)		.637 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Tabel 3.4 menunjukkan nilai signifikansi sebesar lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,637, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

3.3 Regresi Linear Sederhana

Regresi linear merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan dasar pengambilan keputusan terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 3. 5
Hasil Regresi Linear Sederhana

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4626.067	1	4626.067	145.327	.000 ^b
	Residual	1846.267	58	31.832		
	Total	6472.333	59			

a. Dependent Variable: TotalY
b. Predictors: (Constant), TotalX

Berdasarkan tabel 3.5 tingkat signifikansi 0,000 yang berarti nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain bahwa Transaksi Non Tunai berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.4 Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kategori kekuatan antara dua variabel dengan melihat nilai R^2 . Pada tabel 3.6 menjelaskan bahwa nilai pada Adjusted R square sebesar 0,710 yang artinya Pengaruh Transaksi Non Tunai (X) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 71% dan berada pada kategori kuat karena lebih dari 0,67 menurut Perdian (2017).

Tabel 3. 6
Koefisien Dererminasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.845 ^a	.715	.710	5.642

a. Predictors: (Constant), TotalX

3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah diajukan, serta mempermudah dalam pengambilan keputusan hasil penelitian. Karena pada penelitian hanya terdapat dua variabel maka pengujian hipotesis cukup menggunakan uji T.

Tabel 3. 7
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.930	7.564		-.123	.903
	TotalX	.992	.082	.845	12.055	.000

a. Dependent Variable: TotalY

Tabel 3.7 diketahui nilai t 12.055, maka dapat disimpulkan bahwa 12.055 lebih besar dari 1.67155 dimana terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Maka dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima sedangkan H₀ ditolak.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menguji pengaruh antara variabel transaksi non tunai (X) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) masih sedikit yang meneliti variabel tersebut. Pada penelitian Yudhanti terdapat perbedaan pada tujuan yaitu meneliti penerapan. Penelitian Zeyn terdapat dua variabel yaitu Good Governance (X1), Standar Akuntansi Pemerintah (X2) dan Akuntabilitas Keuangan (Y). Zeyn meneliti Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan *Fraud* dan Kinerja Bendahara.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan semakin banyak penerapan sistem transaksi non tunai akan berdampak baik untuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan bagi dalam lingkup internal kantor maupun daerah demikian pula sebaliknya. Semakin sedikit penerapan sistem transaksi non tunai memperburuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan. Maka dari itu penyalahgunaan keuangan daerah dapat diminimalisir.

IV KESIMPULAN

Transaksi Non Tunai berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil dari uji t dimana t_{hitung} 12,055 lebih besar dari t_{tabel} 1,67155 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Sementara itu untuk melihat besar pengaruh transaksi non tunai terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat melalui tabel *R Square* dimana nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,710 atau 71% lebih besar dari 0,67, besaran nilai tersebut menunjukkan kekuatan pengaruh antara transaksi non tunai dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penelitian ini, yang disebabkan oleh keterbatasan penelitian mengenai waktu penelitian, kemampuan peneliti dalam mengembangkan variabel penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitian dengan cara mempertimbangkan berbagai variabel lain yang dapat dikategorikan baik berdasarkan gender, umur, jabatan dan sebagainya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Marja Sinurat, MM selaku Ketua Prodi Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Pembimbing Bapak Dr. Drs. Eko Subowo, MBA., serta Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Pandeglang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

Sumber Peraturan

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

Sumber Lainnya

Sandyasmoro, T. O. (2021). *Hubungan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dengan Frauddan Kinerja Bendahara (Perspsi Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Magetan)*. 7(2), 149–157.
Yudhanti, A. L. (2018). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial. *Behavioral Accounting Journal*, 1(2), 132–146. <https://doi.org/10.33005/baj.v1i2.26>
Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1), 52–62.